

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas SDM maka akan semakin mendorong kemajuan suatu bangsa atau daerah. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari upaya negara atau suatu daerah dalam pembangunan manusianya, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sering dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan. Pembangunan adalah usaha atau tindakan aktif yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, dibutuhkan peran dari pemerintah, masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Menurut hasil Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010-2021 menunjukkan bahwa IPM Indonesia naik 0,76%. Pada tahun 2021, IPM akan meningkat secara menyeluruh, termasuk di bidang pengetahuan, standar hidup yang baik, dan umur panjang dan sehat. Sebaliknya, peningkatan IPM pada tahun 2020 hanya ditopang oleh perbaikan pada dimensi umur, hidup sehat, dan pengetahuan, sedangkan aspek kondisi hidup layak mengalami penurunan. Rata-rata pengeluaran riil per kapita (d disesuaikan), yang mewakili standar hidup layak, akan naik sebesar 1,30 persen pada tahun 2021 (Badan Pusat Statistik, 2021). Menurut data BPS tahun 2021, jika tidak ada anak di Indonesia yang mendapatkan pendidikan berkualitas, tidak menutup kemungkinan negara lain akan mengungguli Indonesia dalam hal kualitas sumber daya manusia. Masa depan negara ini akan lebih terjamin jika pendidikan semakin intensif diberikan kepada manusia sejak remaja.

Remaja merupakan individu yang dominan dalam melanjutkan dan menentukan pembangunan nasional berikutnya, menyadari betapa penting dan besarnya peran, serta tanggung jawab mereka terhadap bangsa Indonesia ini maka mereka secara tidak langsung dituntut untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Akan tetapi disisi lain para remaja ini dihadapkan pada era globalisasi yang senantiasa berdampak kepada krisis nilai dan intelektual diri mereka sendiri, sehingga mereka ragu dan gamang akan identitas, kemampuan dan kemandirian pada diri mereka. Rentang usia

remaja antara 15-21 tahun merupakan titik awal kematangan yang menghambat seseorang memasuki usia dewasa, dan juga dapat menjadi masalah ketika seseorang tidak mampu menyikapinya secara terbuka dan jujur. Menurut perkembangannya kebutuhan memperoleh identitas diri dan kemandirian sangat menonjol dan spesifik pada tataran usia ini, namun apabila ini tidak terpenuhi maka akan terjadi berbagai masalah sosial lainnya. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka diperlukan pelayanan sosial secara khusus bagi remaja putus sekolah yang mengalami kondisi yang kurang menguntungkan, yaitu melalui program bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan agar mereka dapat tumbuh kembang secara wajar sesuai perkembangan usianya.

Masalah kesejahteraan sosial ini harus ditangani secara serius oleh pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan bagi semua lapisan masyarakat meskipun tidak dapat ditanggulangi secara total. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, termasuk dengan meningkatkan fasilitas sosial. Ada 25 jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) diantaranya: anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak balita terlantar, anak jalanan, anak memerlukan perlindungan khusus, anak korban tindak kekerasan, bekas binaan lembaga pemasyarakatan, fakir miskin, gelandangan, korban bencana alam, korban bencana sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis, kelompok minoritas, korban penyalahgunaan napza, korban *trafficking*, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, orang dengan HIV/AIDS, penyandang disabilitas, pemulung, pengemis, pekerja migran bermasalah sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, dan tuna susila (Data PMKS Dinas Sosial, 2019).

Seseorang atau keluarga dikatakan mengalami masalah kesejahteraan sosial apabila tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya karena adanya hambatan, tantangan, atau gangguan yang menghalanginya untuk menciptakan interaksi yang harmonis dan kreatif dengan lingkungan sekitarnya dan mengakibatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu individu yang diteliti mengalami masalah kesejahteraan sosial adalah anak terlantar, yaitu anak-anak berusia antara 5-18 tahun yang terlantar karena berbagai alasan, termasuk kemiskinan, orang tua mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari

mereka, sehingga kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan mereka terhambat, dan pertumbuhan di segala bidang jasmani, rohani, dan sosial (Dinas Sosial, 2019).

Anak terlantar telah menjadi fenomena di Indonesia yang menuntut pemecahan secara komprehensif. Sehubungan dengan upaya perbaikan kondisi anak terlantar tersebut, setidaknya diperlukan upaya transformatif untuk menangani anak terlantar melalui pembelajaran transformatif. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nonformal ditujukan bagi mereka yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai alternatif, pelengkap, atau penambah pendidikan formal. Sebagai anggota masyarakat yang tidak berdaya, anak-anak terlantar ini membutuhkan keterampilan untuk membantu mereka menjadi lebih berdaya. Berdasarkan open data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2020 disebutkan bahwa angka terkait masalah kesejahteraan sosial ini mencapai 5.861.842 kasus yang melingkupi 26 kategori PMKS. Jumlah anak terlantar di Jawa Barat mencapai 101.233 orang. (Open Data Jabar, 2021).

Sehubungan dengan upaya perbaikan kondisi anak terlantar tersebut, setidaknya diperlukan upaya transformatif untuk menangani anak terlantar melalui pembelajaran transformatif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nonformal ditujukan bagi mereka yang membutuhkan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai alternatif, pelengkap, atau penambah pendidikan formal. Sebagai anggota masyarakat yang tidak berdaya, anak-anak terlantar ini membutuhkan keterampilan untuk membantu mereka menjadi lebih berdaya. Dalam rangka memudahkan masyarakat miskin dan rentan kemiskinan di desa/kelurahan yang bersangkutan mengakses pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR membentuk Balai Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, dalam mendirikan pusat kesejahteraan sosial. Pemerintah desa/kelurahan diharapkan memberikan regulasi dan dukungan dana. Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemberdayaan sosial

dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal dan peralatan, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian dan jejaring sosial, penataan lingkungan dan bimbingan lanjut”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka anak terlantar merupakan salah satu PMKS yang menjadi sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam memberikan pemberdayaan dan pelatihan keterampilan agar anak terlantar dapat lebih mandiri.

Pemerintah khususnya Jawa Barat juga telah mengupayakan pemberdayaan dan menyelenggarakan pelatihan keterampilan dalam pembekalan *life skill* bagi anak terlantar. Sebagaimana tercantum dalam Intruksi Presiden No.15 tahun 1974 dalam Kamil (2012) pengertian pelatihan dirumuskan bahwa pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. Sasaran pelatihan atau *training* meliputi semua kalangan masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk itu diperlukannya upaya dan keterlibatan berbagai pihak untuk mengatasi masalah anak terlantar secara terencana, terarah dan terpadu baik dari pemerintah maupun masyarakat. Salah satu upaya pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial Jawa Barat melakukan bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh UPTD Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR) dan Satuan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (SP PPSBR).

Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR) merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis yang menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan memajukan, mengembangkan, meningkatkan, dan memantapkan potensi dan sumber daya anak terlantar melalui bimbingan fisik, mental, sosial dan pelatihan keterampilan. Ditinjau dari usaha kesejahteraan anak, panti sosial merupakan suatu pelayanan substitusi atau pengganti yaitu suatu lembaga pelayanan sosial

yang melaksanakan fungsi sebagai pengganti keluarga, terutama yang berupa pemberian asuhan pendidikan dan perlindungan secara tepat dan maksimal sehingga anak mampu menghayati kedudukan dan peranan sosialnya dalam rangka mempersiapkan diri sebagai manusia dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab dan sukses secara individual dan sosialnya (Zubaedi, 2007: 15.16).

Melalui Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR) yang secara resmi melakukan pembinaan kepada remaja penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kecamatan Lembang, Provinsi Jawa Barat. PPSBR ini adalah lembaga pelayanan sosial milik pemerintah provinsi Jawa Barat yang melaksanakan bimbingan pada remaja terlantar putus sekolah yang mengalami masalah sosial pada rentang usia 18-22 tahun, belum menikah yang berasal dari kabupaten/kota se- Jawa Barat. Terlepas dari itu, motif remaja untuk dibina di PPSBR ini ada berbagai macam latar belakang, mayoritas remaja binaan atau yang selanjutnya disebut dengan klien di PPSBR Lembang ini adalah mereka yang mendapat rekomendasi dari dinas sosial kabupaten atau kota, rekomendasi dari lingkungan RT/RW, dorongan dari keluarga dan ada pula yang inisiatif datang secara sukarela. Dalam praktiknya, bimbingan yang diterapkan oleh PPSBR dilakukan selama 4 bulan melalui sistem panti (asrama). Adapun program pemberdayaan yang dilakukan oleh Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR) Lembang ini meliputi keterampilan tata boga, barbershop, barista, menjahit konveksi, dan montir motor. Selain itu juga para anak-anak ini diberikan pelayanan sosial secara khusus melalui program bimbingan fisik, mental, sosial agar mereka dapat tumbuh secara wajar sesuai perkembangannya. Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR) Lembang ini merupakan panti pemberdayaan rujukan dari berbagai wilayah di Provinsi Jawa Barat, hal ini dibuktikan dengan domisili peserta yang memperoleh rekomendasi dan berasal dari kabupaten/ kota wilayah Jawa Barat. (PPSBR, 2021).

Berkaitan dengan usaha PPSBR dalam pemberian pelayanan sosial untuk anak terlantar sesuai dengan UU Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Sudjana (2010) menjelaskan bahwa proses pembelajaran pada pendidikan luar sekolah berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan bagi pendidikan masyarakat. Tujuan pendidikan masyarakat bukan hanya perubahan perilaku individu dalam masyarakat tetapi juga perilaku kolektif kelompok dan masyarakat termasuk perubahan sosial yang luas termasuk anak terlantar yang merupakan salah satu bagian dari masyarakat.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa PPSBR Lembang telah banyak meluluskan klien yang telah memiliki sertifikat kompetensi namun satu tahun terakhir jumlah peserta menurun dan tidak mencapai target peserta. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terkait faktor yang melatarbelakangi peserta untuk mengikuti pelatihan, bagaimana strategi atau langkah-langkah pendampingan yang dilakukan serta penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tingkat efektivitas program pelatihan anak terlantar melalui program keterampilan. Untuk itu melalui program-program yang diberikan oleh Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (PPSBR) ini dapat memberikan pelatihan kepada anak terlantar sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hidup mandiri dan keberfungsian sosialnya di tengah masyarakat dengan bantuan pemerintah maupun agen-agen pembaharuan yang ada di masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan maka penelitian ini berjudul **“Pelatihan Anak Terlantar Melalui Program Keterampilan Untuk Membangun Kemandirian Peserta Studi Kasus di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Lembang”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan dijabarkan di dalam penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak terlantar untuk mengikuti pelatihan di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Lembang?
2. Bagaimana langkah-langkah pelatihan anak terlantar di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Lembang?

3. Bagaimana hasil pelatihan anak terlantar di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Lembang?
4. Bagaimana dampak pelatihan anak terlantar di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Lembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian tujuan yang ingin dicapai adalah soslusi dalam menangani masalah keberadaan anak terlantar diantaranya:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi anak terlantar untuk mengikuti pelatihan di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Lembang
2. Menganalisis langkah-langkah pelatihan anak terlantar di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Lembang.
3. Menganalisis luaran yang dihasilkan dari pelatihan anak terlantar di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Lembang
4. Menganalisis dampak pelatihan anak terlantar di Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja Lembang

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yaitu secara teoritis dan praktis;

a. Secara teoritis

1. Memberikan gambaran dari pelatihan anak terlantar melalui panti pemberdayaan sosial bina remaja dalam mengatasi permasalahan anak terlantar di Provinsi Jawa Barat.
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rekomendasi dan solusi penanganan anak terlantar dalam usaha mengeluarkan anak tersebut dari posisi anak terlantar melalui pelatihan yang dilakukan oleh Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan dan memperkaya pengembangan teori ilmu pendidikan.

b. Secara Praktis

1. Melalui upaya pelatihan anak terlantar melalui pemberdayaan sosial bina remaja Provinsi Jawa Barat, peneliti dapat memberikan kontribusi aktif pada

penyelenggara program penanganan anak terlantar dalam mengatasi masalah anak terlantar.

2. Bagi pemerintah dan instansi/lembaga, hal ini dijadikan acuan, memperkaya hasil penelitian sejenis, mengatasi kasus penanganan anak terlantar di masyarakat, dan anak terlantar melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan, diharapkan dapat meminimalisir keberadaan anak terlantar melalui program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh panti pemberdayaan sosial bina remaja.
3. Bagi anak terlantar mohon diberikan keterangan dan penjelasan tentang hasil penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan anak yang sesuai UU No. 23 Tahun 2003.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka berikut ini adalah sistematika penulisan tesis yang ditetapkan dalam pedoman penulisan karya ilmiah UPI (2019) yaitu:

1. **BAB I Pendahuluan:** berisikan uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
2. **BAB II Kajian Pustaka:** merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian atau teori yang melandasi permasalahan penelitian yaitu terdiri dari konsep pendidikan masyarakat, ruang lingkup pemberdayaan, pengertian anak terlantar, pelatihan, dan penelitian yang relevan.
3. **BAB III Metode Penelitian:** merupakan bagian yang bersifat prosedural yang meliputi desain penelitian, partisipan dan lokasi penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.
4. **BAB IV Temuan dan Pembahasan:** merupakan pemaparan mengenai temuan selama penelitian. Pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah ditemukan sebelumnya dalam temuan dan dikaitkan dengan teori yang mendasari di kajian pustaka.
5. **BAB V Simpulan dan Rekomendasi:** merupakan simpulan mengenai kondisi di lapangan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

Atika Indah Cahyani, 2023

PELATIHAN ANAK TERLANTAR MELALUI PROGRAM KETERAMPILAN UNTUK MEMBANGUN KEMANDIRIAN (STUDI KASUS DI PANTIPEMBERDAYAAN SOSIAL BINA REMAJA LEMBANG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu